

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN, DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Survei Pada Pemerintah Daerah Se-Eks. Karesidenan Surakarta)**

**Intan Febriani ¹⁾
Aris Eddy Sarwono ²⁾
Dewi Saptantinah P.A ³⁾**

1, 2, 3)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail : ¹⁾ febraniintan86@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of human resource competencies, internal control systems, and the principles of regional financial management on the quality of local government financial reports. This research was conducted using a survey method of the civil apparatus of the Se-Eks regional government. Surakarta Residency. The type of data used is quantitative data. The data source used is primary data. Data collection techniques with interviews, questionnaires, and documentation. The population in this study were all civil servants of the state government of the Se-Eks. Surakarta Residency. The sample used in this study is the state civil apparatus in the regional government accounting department. Surakarta Residency. The sampling technique is done by using purposive sampling method. This research shows that human resource competencies, internal control systems, and regional financial management principles affect the quality of financial statements.

Keywords: *Human Resource Competencies, Internal Control Systems, Principles Of Regional Financial Management, The Quality Of Local Government Financial Reports*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik di Indonesia ditandai dengan semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas pada lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Salah satunya akuntabilitas finansial pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Laporan keuangan merupakan posisi keuangan yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik. Informasi laporan keuangan yang disajikan harus memiliki nilai bagi para penggunanya (Widari dan Sutrisno, 2017). Peran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditingkatkan dalam melakukan pemeriksaan. Auditor didorong untuk selalu memonitor dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan keuangan.

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. BPK menemukan masalah pada laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Permasalahan yang ditemukan itu berasal dari temuan kelemahan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan (Danang S, 2018 berita detikFinance). Pemerintah daerah

Se-Eks Karesidenan Surakarta yang terdiri dari enam kabupaten dan satu kota madya sudah menerima opini yang diberikan oleh BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta masih memiliki kelemahan dalam sistem pengendalian dan kepatuhan perundang-undangan yang ditemukan BPK dalam pelaporan keuangan. Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian (Tampubolon dan Ahmad, 2019) menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya sumber daya manusia yang tidak berkompotensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Berbeda dengan penelitian (Fitriana dan Agus, 2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan risiko lingkungan. Berdasarkan penelitian (Moha, dkk. 2017) sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian (Fitriana dan Agus, 2017) bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya sistem pengendalian intern tidak memiliki peran dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penerapan prinsip pada keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan peraturan. Berdasarkan penelitian (Defitri, 2018) prinsip pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketetapan pemerintah belum tentu dapat menjamin bagusnya kualitas laporan keuangan pemerintah suatu daerah. Berbeda dengan penelitian (Moha, dkk. 2017) bahwa prinsip pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan penelitian ini: 1) Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 2) Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 3) Untuk menganalisis pengaruh prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KAJIAN TEORI

1. Teori Stakeholder

Freeman (1984) dalam Mainader et al (2011) menjelaskan bahwa *Stakeholder Theory* merupakan organisasi harus peduli dengan kepentingan *stakeholders* ketika membuat keputusan strategis. Menyimpulkan bahwa teori ini menjelaskan mengenai pentingnya perusahaan untuk memuaskan keinginan para *stakeholder*. Tujuan utama adalah untuk membantu dalam meningkatkan pencapaian nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang muncul. Implikasi teori *Stakeholder* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan aparaturnya sipil negara setelah melaksanakan tugasnya harus membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk dari transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

2. Kompetensi Sumber Daya manusia

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik lainnya atau kompetensi pribadi lain untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan (Marwansyah, 2016: 36). Pengelolaan keuangan yang baik harus memiliki kompetensi sumber daya manusia

didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

3. Sistem Pengendalian Intern

pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Dadang, 2016).

4. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat (Siska, 2018). Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi: a) Akuntabilitas, b) *Value for money*, c) Kejujuran, d) Transparan, e) Pengendalian.

5. Kualitas laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

HIPOTESIS

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia berperan dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan mendukung pada segala aspek. Seperti latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman bekerja, dan sering mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan keahliannya. Kurangnya keahlian yang dimiliki akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan serta dikhawatirkan akan adanya kekeliruan pada proses penyusunan laporan keuangan tersebut.

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (Widari dan Sutrisno, 2017). Melalui sistem pengendalian internal yang baik juga akan mengurangi resiko adanya kekeliruan maupun kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga mampu menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik.

Pengaruh prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Prinsip pengelolaan keuangan sudah diterapkan, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan efisien dan tepat. Tujuan pengelolaan laporan keuangan adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah dan dapat menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

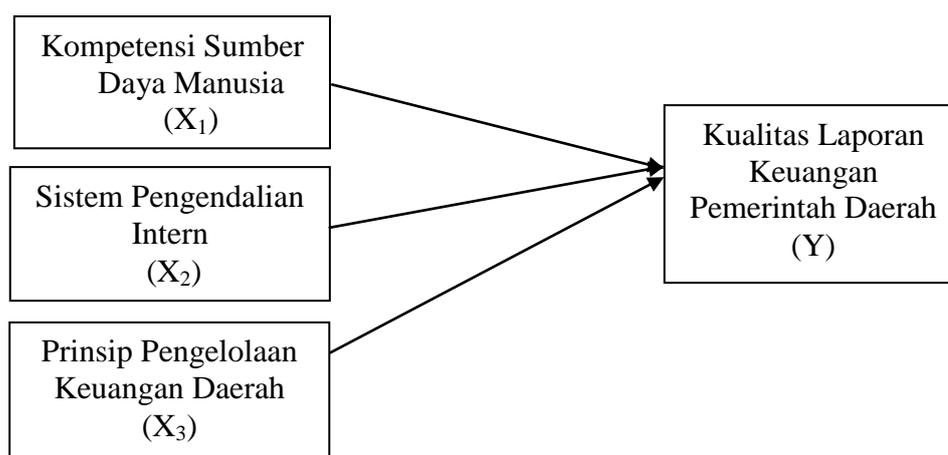
H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3 : Prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk menunjukkan suatu arah dari penelitian agar dapat memperoleh susunan yang lebih jelas, diperlukan sebuah kerangka pemikiran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan skema kerangka pemikiran diatas, terdapat duavariabel yaitu:

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2015: 61). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia (X_1), sistem pengendalian intern (X_2), dan prinsip pengelolaan keuangan daerah (X_3).

2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015: 61). Variabel terikat adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah daerah Se-Eks. Karesidenan Surakarta yaitu sebanyak 73 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 65 orang yang didasarkan pada jumlah kuesioner yang kembali. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria pegawai bidang akuntansi pemerintah daerah Se-Eks. Karesidenan Surakarta. Pelaksanaan penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 16 Januari 2020 sampai 20 Februari 2020 dengan cara peneliti mendatangi secara langsung kantor pemerintah daerah Se-Eks. Karesidenan Surakarta.

HASIL

1. Uji Instrumen Penelitian

Jumlah instrumen pernyataan dalam penelitian ini adalah 30 pernyataan. Perincian instrument pernyataan kompetensi sumber daya manusia (X_1) sebanyak 6 pernyataan, pemanfaatan teknologi informasi (X_2) sebanyak 5 pernyataan, sistem pengendalian intern (X_3) sebanyak 6 pernyataan, prinsip pengelolaan keuangan daerah (X_4) sebanyak 7 pernyataan, dan kualitas laporan keuangan (Y) sebanyak 6 pernyataan. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas sebagai berikut:

a. Uji validitas

Berdasarkan lampiran uji validitas dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) yang diajukan kepada responden sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$. Berdasarkan lampiran uji validitas dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) yang diajukan kepada responden sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$.

Berdasarkan lampiran uji validitas diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel sistem pengendalian internal (X_2) yang diajukan kepada responden sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$. Berdasarkan lampiran uji validitas diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel prinsip pengelolaan keuangan daerah (X_3) yang diajukan kepada responden sebanyak 7 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$. Berdasarkan lampiran uji validitas diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel kualitas laporan keuangan (Y) yang diajukan kepada responden sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$.

b. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Kompetensi sumber daya manusia	0,745	0,60	Reliabel
Sistem pengendalian intern	0,691	0,60	Reliabel
Prinsip pengelolaan keuangan daerah	0,714	0,60	Reliabel
Kualitas laporan keuangan	0,702	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan uji reliabilitas diperoleh hasil bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,745 (74,5%), sistem pengendalian intern memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,691 (69,1%), prinsip pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,714 (71,4%) dan kualitas laporan keuangan memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,702 (70,2%) yang berarti bahwa setiap variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 (60%) sehingga dinyatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Metode regresi linear berganda mensyaratkan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk menguji model regresi variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^a	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,13629099
Most Extreme Differences	Absolute	0,119
	Positive	0,104
	Negative	-0,119-
Kolmogorov-Smirnov Z		0,960
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,315

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan uji normalitas bahwa nilai *p-value* $0,315 > 0,05$. Hal ini menunjukkan tidak signifikan, artinya bahwa H_0 diterima dan data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	1,096	2,260		0,485	0,629		
Kompetensi Sumber daya Manusia	0,283	0,100	0,293	2,827	0,006	0,491	2,036
Sistem Pengendalian Intern	0,341	0,108	0,330	3,167	0,002	0,488	2,049
Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah	0,287	0,105	0,311	2,720	0,008	0,406	2,465

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai *tolerance* 0,491 dan nilai VIF 2,036, sistem pengendalian

intern memiliki nilai *tolerance* 0,488 dan nilai VIF 2,049, dan prinsip pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai *tolerance* 0,406 dan nilai VIF 2,465. Semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan model regresi tersebut lolos uji multikolinearitas.

3. Hasil Uji Regresi

a. Uji t

Tabel 4. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,096	2,260		0,485	0,629
Kompetensi SDM	0,283	0,100	0,293	2,827	0,006
SPI	0,341	0,108	0,330	3,167	0,002
Prinsip Pengelolaan keuangan daerah	0,287	0,105	0,311	2,720	0,008

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung variabel X1, X2, dan X3 signifikan sebesar 2,827; 3,167; 2,720 dengan *p-value* sebesar 0,006; 0,002; 0,008 < 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak berarti ada pengaruh signifikan kompetensi sumber daya manusia (X_1), sistem pengendalian intern (X_2) dan prinsip pengelolaan keuangan daerah (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pemerintah daerah Se-Eks. Karesidenan Surakarta.

b. Uji F

Tabel 5. Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	173,304	3	57,768	42,644	0,000
Residual	82,634	61	1,355		
Total	255,938	64			

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 42,644 dengan *p-value* 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak berarti model pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sudah tepat.

c. Uji koefisien Determinasi

Tabel 6. Uji koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,823	0,677	0,661	1,16390

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai *Adjusted R Square* 0,661 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan variabel independen kompetensi sumber daya

manusia (X_1), sistem pengendalian intern (X_2), dan prinsip pengelolaan keuangan daerah (X_3) terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y) pemerintah daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta 66,1%. Sisanya ($100\% - 66,1\%$) = 33,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

PEMBAHASAN

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Uji validitas diperoleh nilai *p-value* $0,000 < 0,05$ setiap item pernyataan sudah valid dan nilai reliabilitasnya diperoleh *Cronbach Alpha* $0,745 < 0,60$ sehingga reliabel. Hal ini menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,090 dengan *p-value* sebesar $0,041 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh signifikan kompetensi sumber daya manusia (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pemerintah daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta, sehingga terbukti kebenarannya.

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Uji validitas diperoleh nilai *p-value* $0,000 < 0,05$ setiap item pernyataan sudah valid dan nilai reliabilitasnya diperoleh *Cronbach Alpha* $0,691 < 0,60$ sehingga reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,068 dengan *p-value* sebesar $0,043 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh signifikan sistem pengendalian intern (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pemerintah daerah Se-Eks. Karesidenan Surakarta, sehingga terbukti kebenarannya.

Pengaruh prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Uji validitas diperoleh nilai *p-value* $0,000 < 0,05$ setiap item pernyataan sudah valid dan nilai reliabilitasnya diperoleh *Cronbach Alpha* $0,714 < 0,60$ sehingga reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,104 dengan *p-value* sebesar $0,040 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh signifikan prinsip pengelolaan keuangan daerah (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pemerintah daerah Se-Eks. Karesidenan Surakarta, sehingga terbukti kebenarannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Se-Eks. Karesidenan Surakarta. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, maka semakin tinggi juga hasil kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Se-Eks. Karesidenan Surakarta. Hal ini berarti semakin tinggi sistem pengendalian internal, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik. Prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Se-Eks. Karesidenan Surakarta. Hal ini berarti pengelolaan keuangan yang sudah sesuai dengan peraturan dan prinsip, maka kualitas laporan keuangan menjadi baik.

DAFTAR PUSTAKA

Dadang. 2016. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Penerbit PPM.

- Defitri Siska Y. 2018. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Benefita*. Vol. 3, No. 1, Februari. p. 64-75.
- Fitriana dan Agus Wahyudin. 2017. "Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting On Local Government Of Purbalingga". *Accounting Analysis Journal*. Vol. 6, No. 1.
- Mardinan T, dkk. 2018. "Effect Of Human Resources, Leadership Style, The Use Of Information Technology And Internal Control On The Quality Of Financial Statements". *Journal of accounting auditing and business*. Vol. 1, No. 1.
- Mainardes, E. W, dkk. 2011. "Stakeholher theory: issues to resolve". *Management Dicision*. Vol. 49, No. 2, p. 226-252.
- Marwansyah, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. Alfabeta, CV.
- Moha Febriyani, dkk. 2017. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolalang Mongondow Selatan". *Jurnal EMBA*. Vol. 5, No. 2, Juni. p. 1359-1370.
- Tampubolon Fitri M dan Ahmad Basid. 2019. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*. Vol. 3, No. 1.
- Widari Liziana dan Sutrisno. 2017. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. Vol. 5, No. 10, p. 117-126.